

6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Reformasi di Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Politik Islam

Gilang Rizki Aji Putra

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



[10.15408/adalah.v4i2.16490](https://doi.org/10.15408/adalah.v4i2.16490)

Abstract:

Reformation 98 is a historical turning point, where the national agenda has replaced a New Order era that seemed totalitarian and full of militaristic elements, towards a more democratic system of state life. The democratization is based on the interests of the people who are felt to have experienced a lot of moral and material oppression, so that not a few of the rights of citizens are not fulfilled and even eroded. The Momentum of Reformation 98 is the right time for the process of implementing, transforming, internalizing, and revitalizing Islamic values through political struggle.

Keywords: Reform 98; Democracy; Islamic Politics

Abstrak:

Reformasi 98 merupakan sebuah titik balik sejarah, dimana agenda nasional tersebut telah menggantikan sebuah era Orde Baru yang terkesan totaliter dan penuh unsur militeristik, ke arah sistem tatanan kehidupan bernegara yang lebih demokratis. Demokratisasi itu dilandaskan atas kepentingan rakyat banyak yang dirasa mengalami banyak penindasan secara moral maupun materil, sehingga tidak sedikit pula hak-hak warga negara yang tidak terpenuhi bahkan terkikis. Momentum Reformasi 98 merupakan saat yang cukup tepat untuk proses implementasi, transformasi, internalisasi, serta revitalisasi nilai-nilai islam melalui perjuangan politik.

Kata Kunci: Reformasi 98; Demokrasi; Politik Islam

PROLOG

Sepanjang sejarahnya sebagai sebuah negara, Indonesia akan selalu terikat dengan sejarah kelam maupun gemilangnya. Mulai dari zaman kerajaan dengan segala pencapaian dan keterbelakangannya sampai masa penjajahan dengan penindasan dan perjuangan kemerdekaannya. Bahkan pasca kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 pun perjuangan memperoleh kemerdekaan sejati itu belum selesai, hal itu dibuktikan dengan masih bercokolnya tentara-tentara sekutu yang masih bersikeras mengukuhkan cengkramannya, pemberontakan-pemberontakan seperti PKI Madiun, DITII, dsb. Peristiwa-peristiwa itu tentu sangat berpotensi melahirkan stress sosial pada masyarakat yang baru memperoleh kemerdekaannya dari penjajahan (Rakhmat, 2005: 32).

Sejatinya keterikatan negara dan dinamika kesejarahannya berupa dampak dari keterikatan manusia-manusia didalamnya sebagai subjek sejarah. Segala pertentangan yang hadir merupakan sebuah proses alam dimana manusia tidak dapat menghindarkan diri darinya. Melainkan manusia dituntut untuk mampu mengatasi persoalan yang dihadapkan kepadanya tersebut sebagai bentuk dedikasinya terhadap Tuhan yang telah mengamanahkan bumi beserta segala isinya untuk dipimpin dan dikelola oleh manusia. Sebagaimana firman-Nya: "Dan Ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan (manusia) khalifah dimuka bumi." (Q.S. Al-Baqarah 30).

Sebagai sebuah matter sejarah bersifat dinamis, dalam artian segala pertentangan yang terjadi di dalamnya tidak dapat diterima mentah-mentah kebenarannya sekaligus tidak dapat ditolak tanpa landasan yang mampu dipertanggungjawabkan (Albert, 1985: 119).

Sepanjang perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini, tidak sedikit problematika yang disebabkan oleh dinamika kesejarahan bangsa dan masih dapat dirasakan dampaknya sampai hari ini. Oleh karena itu, mahasiswa selaku intelektual muda

sejatinya dituntut untuk terus memahami sejarahnya, masyarakatnya, sadar akan masalahnya serta mampu menentukan nasibnya (Shariati, 1993: 162). Terutama atas apa yang telah diprakarsai oleh mahasiswa pada masa lampau yang ditujukan untuk merombak tatanan sistem pemerintahan yang cacat bernama Orde Baru kala itu. Terlebih sebagai seorang muslim yang dituntut terus konsisten dalam kebenaran dan mendakwahnya, mahasiswa muslim harus mampu menganalisis tantangan-tantangan yang dihadapi Islam baik skala mikro maupun makro dan hal-hal yang melatarbelakanginya. Dalam tulisan ini, penulis akan memaparkan tentang reformasi 98 serta dampak yang diberikannya terhadap politik Islam.

Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan mengembangkan perspektif yang akan digunakan untuk memahami dan menggambarkan realitas. Karena itu, peneliti kualitatif berpendirian ekspansionis, tidak reduksionis. Ia tidak menggunakan proposisi yang berangkat dari teori, melainkan menggunakan pengetahuan umum yang sudah diketahui serta tidak mungkin dinyatakan dalam bentuk proposisi dan hipotesis. Adapun secara operasional, pendekatan yang digunakan berupa studi pustaka. Dimana realitas objektif serta keterkaitan sejarahnya penulis telusuri melalui karya-karya ilmiah yang pernah dibuat dan terpublikasikan.

REFORMASI 98

Secara etimologis Reformasi merupakan kata berimbuhan "re-" yang bermakna kembali, sedangkan formasi berartikan susunan atau barisan sebagaimana tertera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Reformasi 98 tersendiri tergolong public transcript karena berisikan perlawanan yang bersifat gerakan massa dengan sistematis sesuai dengan hukum yang berlaku, memiliki konsekuensi revolusioner berupa dampak perubahan yang mempengaruhi kelangsungan hidup masyarakat, serta berpijak pada rasionalitas berupa keber-

pihakan pada kepentingan rakyat banyak (Scott, 2000: 385). Gerakan reformasi ini dilakukan oleh para mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia dengan menyampaikan aspirasi, yang tentunya juga disertai oleh golongan-golongan lain yang ikut andil dengan porsi perjuangannya masing-masing.

Dampak yang sangat signifikan pasca Reformasi dalam sudut pandang politik berupa lahirnya partai-partai politik baru yang sampai pada jumlah 171 partai politik sebagai peserta pemilu (Kamaludin; Alfian, 2015: 131). Hal ini tentu menjadi sebuah indikasi akan meningkatnya partisipasi politik dalam masyarakat, yang sebelumnya terus didominasi hanya oleh partai-partai politik berkekuatan besar selama kurang lebih 3 dekade.

DEMOKRASI

Secara etimologis demokrasi terdiri dari kata *demos* dan *kratos* yang berarti kekuasaan rakyat atau *government by the people* (Budiarjo, 2008: 105). Menurut David Lechmann, demokrasi adalah sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik dimana warga negara berhak memilih salah satu diantara para kandidat yang bersaing meraih suara. Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa demokrasi merupakan sebuah sistem politik, dimana rakyat atau warga negara memiliki peran sentral dalam menentukan masa depan kehidupan bernegaranya melalui penun- aian haknya, meskipun dalam sukseki kehidupan bernegara tiap in- dividu memiliki fokus perjuangan yang relatif berbeda.

Dalam konteks kesejarahannya, demokrasi sejatinya telah ada sejak abad ke-6 sampai ke-3 SM yaitu di *city state* Yunani Kuno. Kala itu pun demokrasi sudah ditunjukan untuk menentukan keputusan politik dengan metode pengambilan suara terbanyak secara lang- sung (Budiarjo, 2008: 109). Dalam perspektif Islam, nilai-nilai demo- krasi yang ada sejak zaman Rasulullah SAW adalah sikap egalitern- ya dan tradisi musyawarah yang selalu beliau lakukan dengan para sahabatnya (Bawazir, 2015: 10). Bentuk dari implementasi nilai dem-

okrasi yang diterapkan oleh Rasulullah memang seolah serupa dengan konsepsi demokrasi berdasarkan perwakilan/representative democracy pada negara modern ketika Eropa memasuki abad pertengahan. Namun sejatinya pada penerapannya konsepsi keterwakilan musyawarah Rasulullah dengan para sahabatnya memiliki perbedaan yang sangat fundamental dengan konsepsi keterwakilan feodalistis abad pertengahan. Hal itu adalah penentuan representasi berdasarkan kapasitas serta kompetensi yang ada pada individu terkait, dan bukan pada status sosial yang melekat padanya sebagaimana diterapkan pada konsepsi feodal.

POLITIK ISLAM

Pada dasarnya politik merupakan sebuah metode untuk mencapai tujuan baik individu maupun komunal. Hal ini didasarkan pada aspek entitas manusia sebagai zoon politicon atau makhluk sosial. Dalam perjalanan sejarahnya, pada abad ke-4 sebelum masehi politik pernah menjadi suatu cara manusia untuk mendapatkan sebuah kehormatan. Karena hanya dalam berpolitik manusia dapat terus berada pada sebuah diskursus rasional bersama, berdialog, bekerjasama, bahkan berdebat. Kondisi demikianlah yang menjadikan politik sebagai sebuah jalan alternatif bagi manusia untuk membentuk kesadaran kritisnya (Suseno, 2009: 30).

Dalam konteks peradaban Islam, transformasi kedudukan Rasulullah sebagai pemuka agama sekaligus kepala negara sejatinya merupakan sebuah proses politik paling efektif yang ditempuh demi mewujudkan cita-cita Islam. Mengingat betapa berat dan panjangnya proses yang beliau dan ummatnya lalui untuk membangun kekuatan massa maupun ekonomi sebelum akhirnya mampu mendapatkan posisi strategis untuk penyebar luasan ajaran Islam. Menurut H.O.S Tjokroaminoto, tujuan utama politik Islam adalah untuk menanamkan dan menjalankan cita-cita persaudaraan manusia. Bahkan beliau mengimbuhkan bahwa tidak ada agama manapun yang lebih humanis selain Islam (Tjokroaminoto, 2010: 111). Hal ini didasari

atas ketiadaan konsepsi kasta sosial dalam Islam, sehingga semua manusia sama di mata Tuhan, dan dengan ilmu dan iman lah manusia mampu mengangkat derajatnya sebagaimana firman Allah Swt: "...Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantara kalian, dan orang-orang yang berilmu diantara kalian beberapa derajat.." (Q.S. Al-Mujadalah 11).

PENGARUH REFORMASI TERHADAP POLITIK ISLAM

Reformasi merupakan sebuah proses sekaligus bentuk konkret dari demokratisasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia sendiri telah dijadikan sebagai sebuah acuan baku bagi tatanan kehidupan bernegara, hal ini dibuktikan dengan diaturnya unsur-unsur paling fundamental dalam demokrasi itu didalam konstitusi atau hukum tertinggi yang berlaku. Adapun hal yang melatarbelakanginya selain dari buah pemikiran para founding fathers nya adalah ketidakterlibatan Indonesia dalam blok timur (Soviet) dan Barat (Amerika) pada perang dingin pasca kemerdekaan.Indonesia. Sehingga tidak mengherankan apabila Pancasila yang dijadikan ideologi dasar bagi bangsa ini merupakan sebuah kompromi.

EPILOG

Berdasarkan uraian singkat diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

Pertama; Reformasi 98 merupakan sebuah nafas baru bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Dengan semakin bertambahnya kontestan politik berupa partai politik baik yang bercorak islami maupun nasionalis dalam pesta demokrasi di Indonesia.

Kedua; Sepanjang perjalanan sejarahnya, kenaikan kuantitas partai politik Islam memang merupakan sebuah tolok ukur akan dedikasi serta kepedulian ummat Islam yang cenderung diasumsikan anti-demokrasi terhadap masa depan bangsa Indonesia. Walau-

pun sampai hari ini masih dapat dikatakan bahwa hubungan antara kuantitas subjek-subjek muslim yang terlibat dalam kontestasi politik di Indonesia belum berbanding lurus dengan prestasi berupa permasalahan dalam kehidupan.

Referensi:

Aji, A.M.; Yunus, N.R. *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.

Bawazir, T. (2015). *Jalan Tengah Demokrasi*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar.

Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://jurnal.ugm.ac.id/jps/article/download/23419/15419&ved=2ahUKEwif7vmN8P_oAhVCSX0KHRo4BKU4ChAWMAI6BAgFEAE&usg=AOvVaw2zlEyj_RXZjXDt5DwBelha

<https://www.neliti.com/id/publications/246305/resistensi-sosial-masyarakat-suku-bajo-studi-kasus-atas-perlawanan-masyarakat-di>

Kamaludin U, A, & Alfian, M. (2015). *Dinamika Politik di Indonesia*, Bandung, Pustaka Setia.

Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.

Rakhmat, J. (2005). *Rekayasa Sosial*, Remaja Rosdakarya,

Reason New Jersey 1985, Yogyakarta, IRCISoD.

Rekonstruksi Nalar Kritis, (2014). Hans Albert diterjemahkan dari buku *Treatise on Critical*

Scott, J, C. (2000). *Senjatanya Orang-Orang Kalah*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

Shariati, A. (1993). *Ideologi Kaum Intelektual*, Bandung, Mizan.

Suseno F, M. (2009). *Menjadi Manusia Belajar Melalui Aristoteles*, Yogyakarta, Kanisius.

Tjokroaminoto H.O.S., (2010). *Islam dan Sosialisme*, Bandung, Segi Arsy.

UUD NRI 1945 PASAL 1, dan 27-36.

Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1 (2019)

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Tim Redaktur:** Indra Rahmatullah, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar, Fathuddin, Nurrohimyunus. **Penyunting:** Latipah Nasution, Siti Nurhalimah, Siti Romlah. **Setting & Layout:** Imas Novita Juaningsih.